

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

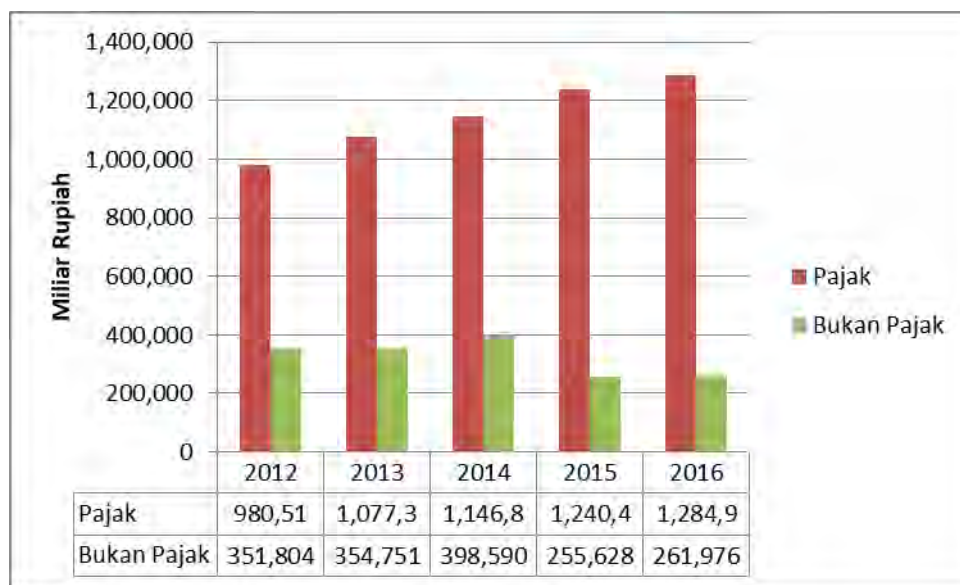
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara besar yang terdiri dari berbagai kepulauan dan lautan, mempunyai penduduk lebih dari 237 juta jiwa dari berbagai suku bangsa, agama dan budaya yang tersebar di seluruh daerah. Jumlah penduduk yang besar ini menjadikan tugas bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan di segala bidang agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, negara harus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mencakup segala bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain negara Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah terutama bencana alam yang membutuhkan anggaran cukup besar untuk menyelesaikan dampak untuk mengembalikan seperti semula. Untuk mewujudkan pelaksanaan dan pemerataan pembangunan dibutuhkan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Pada tatanan kehidupan bernegara, pemerintah merupakan penyelenggara negara yang bertugas untuk mengatur negara di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan

pembangunan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga memiliki fungsi utama dalam perekonomian yaitu fungsi alokasi, pemerintah melakukan alokasi anggaran untuk pengadaan barang-barang publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua fungsi distribusi yaitu pemerintah bertugas untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, agar tingkat ketimpangan pendapatan antar masyarakat berkurang, dan ketiga fungsi stabilisasi, pemerintah bertugas untuk menjaga kestabilan perekonomian negara (Musgrave dan Musgrave, 1989). Terdapatnya kegagalan pasar (*Market Failure*) yang terkait dengan barang publik menegaskan bahwa pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian sebagai penyedia dan pemelihara barang publik. Guna menjalankan fungsi dan peran dalam perekonomian pemerintah memerlukan dana untuk mendanai seluruh kegiatan bernegara. Dana yang digunakan berasal dari penerimaan pemerintah yang diperoleh dari berbagai sumber. Penerimaan didapat dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas pemerintah seperti penyediaan barang dan jasa. Penerimaan pemerintah dapat berasal dari pajak, pinjaman (hutang), bantuan dari asing, servis, dan penerimaan bisnis (Poole, 1956).

Penerimaan pemerintah didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh pemerintah untuk membiayai suatu negara. Pendapatan pemerintah adalah penerimaan yang dikumpulkan dari pajak, alokasi bantuan, pinjaman, hibah, dan pendapatan dari investasi publik. Pemerintah perlu melakukan kajian di bidang ekonomi, politik dan sosial untuk memaksimalkan kesejahteraan warga negara, untuk melakukan kegiatan ini pemerintah memerlukan anggaran dalam jumlah yang besar. Secara umum pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak, iuran wajib dan penerimaan bukan pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri penerimaan pajak berasal iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah an pembebananya berhubungan dengan aktivitas tertentu (Hyman, 2011). Pajak juga dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor pemerintahan. Pada umumnya di beberapa negara penerimaan pemerintah terbesar berasal dari penerimaan pajak seperti di negara

Spanyol, Italia, Inggris, Amerika, Jepang, Thaliand, Cina, dan India. Pendapatan negara di Indonesia juga didominasi oleh penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak seperti pada tahun 2012 hingga 2016. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup berpotensi untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan suatu bangsa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan negara Indonesia sekitar 60 % sampai 70 %-nya berasal dari sektor pajak, seperti pada Gambar 1.1



Sumber : BPS (2018)

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2012 – 2016

Penerimaan pajak Indonesia pada Gambar 1.1 tahun 2012 mencapai Rp. 980,51 triliun sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 351,8 triliun. Penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Selain total penerimaan pajak yang meningkat, persentase penerimaan pajak juga meningkat terhadap total penerimaan negara. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, rincian penerimaan perpajakan terdiri dari tujuh komponen pajak, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lain, bea masuk, dan pajak ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penerimaan pajak masih merupakan sektor yang sangat

penting dalam penerimaan negara. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian makro yaitu mendanai pengeluaran dan serta aktivitas negara, selain itu pajak juga berfungsi untuk mengatur kondisi perekonomian. Pemerintah dapat membebaskan pajak atas produk luar negeri untuk melindungi dan mendukung perkembangan produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai jalannya kebijakan terkait dengan stabilitas tingkat harga dan proyek terkait redistribusi pendapatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan (Direktorat Penyusunan APBN, 2014).

Permasalahan penerimaan pajak yang dihadapi negara Indonesia adalah kurang optimal dalam realisasi pencapaian penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain mencari dana lain untuk menutupi belanja negara yang masih defisit atau melakukan efisiensi dalam belanja negara. Berdasarkan permasalahan penerimaan pajak tersebut maka perlu untuk dilakukan penyusunan dan perencanaan penerimaan pajak negara secara lebih akurat agar pajak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mendanai belanja negara. Guna mengoptimalkan penerimaan pajak penyusunan dan perencanaan model pajak perlu dilakukan dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Terkait hal tersebut telah banyak dilakukan studi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Analisis faktor tersebut menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak tersebut, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) hal ini dijadikan upaya pemingkatan penerimaan pajak karena jika PDB naik maka nilai pajak yang dibayarkan akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuksel, 2013) dengan studi kasus Turki menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara penerimaan pajak dan

variabel ekonomi makro berupa PDB, FDI, cadangan total, kredit domestik, ekspor impor, nilai tukar dan jumlah penduduk. Kebijakan ekonomi makro lainnya yang juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak adalah pengeluaran pemerintah. Berdasarkan penelitian (Muibi dan Sinbo 2011) analisis ketidakseimbangan ekonomi makro terhadap penerimaan pajak yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga.

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris maka analisis variabel-variabel ekonomi makro penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia guna mendanai belanja negara. Pengaruh variabel-variabel makro ekonomi terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang dan jangka pendek juga merupakan bagian yang penting dalam menganalisis penerimaan pajak, sehingga pada penelitian ini akan menggunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model / ECM*) guna menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi yang ada di masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara merata. Studi penerimaan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh (Handoko dan Sofyan, 2014) menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari PDB terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan (Wijayanti dan Firmansyah 2017) menganalisis pengaruh variabel PDB, dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek, hasilnya variabel PDB, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada keterbaruan data dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2017 dengan sumber data berasal dari

World Bank dan BPS. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan lebih mencerminkan dinamika perekonomian yang sedang terjadi saat ini.

1.3 Ringkasan Hasil Penelitian

1. Berdasarkan hasil estimasi, variabel makroekonomi berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia
2. Hasil estimasi menunjukkan variabel makroekonomi yang termasuk dalam model berpengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Gross Domestic Product, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara terhadap penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 1981-2017 dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Kelima bab tersebut terdiri dari: (1) pendahuluan; (2) tinjauan pustaka; (3) metode penelitian; (4) hasil dan pembahasan, dan (5) kesimpulan dan saran.